

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amin, S.M., 1971, *Hukum Atjara Pengadilan Negeri*, Prandja Pramita, Jakarta.
- Badri, KRH., 2005, *Kajian Hukum Nasional Menuju Reformasi Hukum di Indonesia - Rangkuman Pasal di Dalam KUHAP (Buku Ketiga) : Penuntutan dalam Proses Perkara Pidana Menurut KUHAP*, tanpa penerbit, tanpa kota terbit.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Effendi, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Effendi, Tolib, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana : Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP - Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hatta, Muhammad, 2008, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif : Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konsepsi dan Implementasi)*, Penerbit Galangpress, Yogyakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta

- Hiariej, Eddy O.S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Is, Muhamad Sadi, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Hukum Acara Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Prinst, Darwan, 1989, *Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 1990, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bale Bandung, Bandung.
- Sinar Grafika, Redaksi, 2012, *KUHAP Lengkap : Pelaksanaan KUHAP, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soesilo, R., 1993, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Tim Penyusun Naskah Akademik Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2012, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.
- Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang.
- Usfa, A. Fuad, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang.

Zulkarnain, 2006, *Peradilan Pidana : Penuntun Memahami dan Mengawal Peradilan Pidana bagi Pekerja Anti Korupsi*, Yappika, Jakarta.

Zulkarnain, 2008, *Praktik Peradilan Pidana : Panduan Praktis Kemahiran Hukum Acara Pidana*, In-Trans Publishing, Malang.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/009/SK/II/2004 tentang Perubahan atas Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/II/1999 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 02/Pid.S/2018/PN Smn, perihal pemeriksaan tingkat pertama perkara Suraniyawan, 07 Juni 2018.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 326/Pid.B/2018/PN Smn, pemeriksaan tingkat pertama perkara Uji Prasetyo, 27 Agustus 2018.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 05/Pid.S/2017/PN Btl, pemeriksaan tingkat pertama perkara Zariyem, 05 Oktober 2017.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 01/Pid.S/2016/PN Smn, pemeriksaan tingkat pertama perkara Dahlan, 15 Juni 2016.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 01/Pid.S/2015/PN Smn, pemeriksaan tingkat pertama perkara Aji Septiyanto, 01 April 2015.

D. Penelitian Hukum

Dewi, Ratna, 2010, *Implementasi pasal 203 KUHAP Mengenai Wewenang Hakim dalam Pemeriksaan Acara Singkat (The Short Session of The Court) dan Implikasinya Bagi Terwujudnya Asas Pemeriksaan Perkara yang Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Hendarawan, I Gusti Agung Dian, 2015, *Penegakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Denpasar*, Tesis, Program Pascasarjana Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Rizqi, M., 2018, *Tinjauan Hukum Terhadap Kewenangan Penuntut Umum dalam Menentukan Hukum Acara Pemeriksaan Singkat Demi Tercapainya Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

E. Sumber Internet

Anonim, “Rancangan Undang-Undang Nomor.....Tahun.....
tentang Hukum Acara Pidana”,
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/1008_RUU%20KUHAP.doc., diakses 07 November 2018.

Deliarnoor, Nandang A. dan Sigid Suseno, “Modul Hukum : Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus”,
[http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM4309-M1.pdf.](http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM4309-M1.pdf), diakses 10 Mei 2018.

Hukum Online, “Siapa Sajakah Penegak Hukum Di Indonesia?”,
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt502201cc74649/siapa-sajakah-penegak-hukum-di-indonesia>. diakses 22 April 2018.

Pengadilan Negeri Bantul, “Tata Cara Persidangan”, <http://pn-bantul.go.id/index.php/layanan-hukum/prosedur-berperkara/prosedur-pidana/tata-cara-persidangan>, diakses 17 Mei 2008.

Tribun Jogja, 2018, Oknum Supir Curi Uang Jutaan Rupiah di Toko Jejaring di Kawasan Gejayan, <http://jogja.tribunnews.com/2018/05/10/oknum-supir-curi-uang-jutaan-rupiah-di-toko-jejaring-di-kawasan-gejayan>, diakses 01 Oktober 2018.